



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. FARID IRFAN MAHFUDZ
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 124352

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **895.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/77 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 498.500.000
2. Tanah Seluas 188 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 280.050.000
3. Tanah Seluas 1535 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 117.050.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **67.300.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.950.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.350.000
3. MOTOR, SUZUKI MATIC / NEX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOBIL, TOYOTA LGX SOLAR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 50.500.000
5. MOTOR, YAMAHA CRYPTON Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
6. MOTOR, HONDA CS1 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **13.600.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 769.876.981

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.746.376.981

III. HUTANG

Rp. 230.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.516.376.981

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.